



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 02 Juli 2021

Halaman: 8

Yogyakarta Siap Jalankan PPKM Darurat

Pemkot belum memutuskan untuk menutup kawasan Malioboro.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut siap untuk menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, PPKM darurat sebagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat.

"Kami siap menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat karena ini menjadi concern kami untuk mengatasi permasalahan sebaran Covid-19 yang semakin tinggi," kata Heroe yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta tersebut kepada wartawan, Kamis (1/7).

Heroe menuturkan, penyebaran Covid-19 yang sangat cepat terjadi dalam tiga pekan ini di Kota Yogyakarta. Dicurigai penyebaran yang sangat cepat ini terjadi karena sudah adanya varian baru Covid-19 yakni Varian Delta di Kota Yogyakarta.

Walaupun begitu, hingga saat ini belum terdeteksi apakah Varian Delta sudah ada di Kota Yogyakarta

maupun di kabupaten lainnya di Provinsi DIY. Namun, kata Heroe, penyebaran yang sangat cepat ini juga mengakibatkan pertumbuhan kasus baru Covid-19 yang naik secara signifikan.

Bahkan, zona risiko Covid-19 dalam tiga pekan ini juga berubah drastis. Secara keseluruhan, Kota Yogyakarta masuk dalam kategori zona merah Covid-19. Berdasarkan kecamatan, tidak semua kecamatan di Kota Yogyakarta yang masuk dalam zona merah.

"Tiga pekan yang lalu zona hijau untuk PPKM mikro ada 95,5 persen dan 4,5 persen zona kuning. Namun tergerus menjadi 76-77 persen dalam tiga pekan ini, tergerus cepat," ujarnya.

Pihaknya pun akan menyiapkan aturan untuk menindaklanjuti kebijakan PPKM darurat ini. Diharapkan, dengan kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali dapat menekan penyebaran Covid-19 dengan cepat dan signifikan.

"Yang paling penting memang menekan mobilitas dan interaksi masyarakat. Makanya ketika ada kebijakan-kebijakan drastis dari pe-

merintah pusat, ya akan kita siapkan," jelas Heroe.

Pemkot juga belum memutuskan untuk menutup kawasan Malioboro. Hingga saat ini, Pemkot Yogyakarta masih menunggu aturan lengkap dari pemerintah pusat dan Pemda DIY terkait penerapan PPKM darurat yang dimulai 3 Juli 2021.

Walaupun begitu, Heroe mengatakan, pihaknya siap untuk menjalankan PPKM darurat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir.

"Malioboro belum sampai itu (untuk ditutup). Kita tunggu dulu aturan PPKM darurat, tetapi kita sudah antisipasi bagaimana agar orang di Malioboro betul-betul sehat," kata Heroe.

Heroe menyebut, pihaknya menegatkan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan memastikan *sweeping* acak. *Sweeping* dilakukan dengan memeriksa dokumen kesehatan bebas dari Covid-19 bagi siapa saja yang masuk ke kawasan Malioboro.

Selain itu, pihaknya juga akan mensyaratkan bagi masyarakat yang datang ke Yogyakarta hanya yang sudah divaksinasi. Sehingga, bagi yang datang ke Yogyakarta, terutama masuk ke kawasan Malioboro harus menunjukkan kartu vak-

sinasi Covid-19.

"Persyaratan tambahan saat ini adalah orang harus vaksinasi untuk bepergian kemana-mana, termasuk (dokumen) bebas Covid-19. Memang akhir-akhir ini semangat masyarakat untuk ikut vaksinasi saya lihat sangat tinggi," kata Heroe.

Pihaknya juga akan membuat strategi dalam rangka memberikan jaminan agar yang datang ke Yogyakarta dan warga Yogyakarta terhindar sendiri dari Covid-19. Terlebih, di sekitar kawasan Malioboro mengingat sudah ada beberapa pelaku usaha yang terpapar Covid-19 dari pengunjung, yakni di kawasan Jalan Ketandan Lor

Di kawasan tersebut baru-baru ini ditemukan penjaga di empat toko yang sudah terpapar Covid-19 dari pembeli. Imbasnya, empat toko tersebut termasuk toko lainnya yang ada di Ketandan ditutup dalam waktu yang belum dapat ditentukan hingga penyebaran Covid-19 sudah dapat ditekan.

"Malioboro ini kan sebagian dari pertokoan yang dimungkinkan ketika buka itu hanya (diberlakukan) pembatasan waktunya. Malioboro kan tidak ada destinasi khususnya, kecuali menikmati suasana, kuliner, oleh-olehnya. Nanti kita tata dengan kebijakan baru," ujarnya.

■ edo fernan rahadi

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005